

Judul : Kepala daerah banyak kena OTT, komisi II: kegagalan serius proses kaderisasi parpol
Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kepala Daerah Banyak Kena OTT

Komisi II: Kegagalan Serius Proses Kaderisasi Parpol

Senayan menyoroti maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah. Permasalahannya ada proses kaderisasi politik sebelum seseorang maju menjadi kepala daerah.

ANGGOTA Komisi II DPR Indrajaya mencontohkan pernyataan Nadia Arrafiq, Bupati Pekalongan yang mengaku tidak memahami aturan karena latar belakangnya sebagai artis sesaat setelah terjaring OTT KPK. "Pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam proses kaderisasi politik," kritik Indrajaya dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Diketahui, KPK telah menggelar OTT ke sejumlah kepala daerah. Di bulan ini, sudah dua bupati terkena, yakni Bupati Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) Fadia Arafiq yang merupakan kader Golkar dan Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, Fikri Thobari yang merupakan kader PAN.

Partai politik (parpol), lanjutnya, seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan yang memastikan calon kepala daerah (cakada) memahami tata kelola pemerintahan, etika jabatan, dan hu-

duk administrasi negara. Selain itu, OTT ini juga merupakan indikator serius kegagalan pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah.

Penangkapan ini juga menunjukkan proses pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh dimensi moral yang paling mendasar. "Jadi perlu evaluasi terhadap program retreat kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto," desak Indrajaya.

Sebelumnya, kata Indrajaya, retreat memiliki tujuan yang baik sebagai forum konsolidasi nasional. Namun, maraknya kasus OTT menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas substansi pembinaannya. Karena itu, retreat kepala daerah perlu dievaluasi secara serius.

"Kita perlu menilai kembali apakah materi retreat benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik," kata politikus PKB ini.



Indrajaya

Untuk itu, Indrajaya menekankan penanaman nilai moral harus menjadi prioritas utama dalam pembinaan pejabat publik. Dengan itu, pendekatan kedisiplinan, latihan fisik, atau metode semi-militer boleh saja menjadi bagian dari pembinaan. "Tapi tantangan utama kepemimpinan di era pemerintahan digital justru terletak pada etika penggunaan kekuasaan," kata dia.

Indrajaya menambahkan, gelombang OTT yang terus terjadi menunjukkan problem integritas belum tersentuh pada akar budaya. Karena itu, pendekatan penegakan hukum semata tidak

cukup untuk membangun integritas pejabat publik.

Ia menjelaskan perbedaan konsep sosial antara *guilt culture* dan *shame culture*. Banyak negara Barat dipengaruhi oleh budaya rasa bersalah (*guilt culture*), sementara di Jepang berkembang kuat budaya malu (*shame culture*) yang menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Di Jepang, terang dia, pelanggaran etika sekecil apa pun dapat memicu tekanan sosial yang besar. Akibatnya, banyak pejabat memilih mengundurkan diri bahkan sebelum proses hukum berjalan. "Mereka merasa malu kepada publik," jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji menambahkan, banyaknya OTT kepala daerah menunjukkan praktik korupsi masih kerap terjadi. Karena itu, perlu dicari akar persoalannya agar kasus serupa tidak terus berulang ke depannya.

"Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Masa kita saban tahun, saban bulan disugui berita OTT terus," keluh Sarmuji dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Sarmuji mengatakan perlu di-

cari sumber persoalan yang memicu maraknya praktik korupsi. Salah satu kemungkinannya adalah tingginya biaya politik di Indonesia. Termasuk biaya kontestasi politik di tingkat daerah.

Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai rentetan kepala daerah yang terjaring OTT KPK membuktikan tindakan lembaga penegak hukum itu tak cukup menimbulkan efek jera bagi mereka. "Bisa setiap minggu ada OTT, ibarat giliran saja bagi kepala daerah," kata Bima di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Bima menilai perlu ada pembenahan sistem pemilihan kepala daerah hingga pencegahan korupsi. Sebab OTT bukan menjadi salah satu faktor penentu dalam pemberantasan korupsi. "Tinggal kemampuan dari KPK saja semaksimal apa intensitas OTT ini," kata politikus PAN ini.

Dengan itu, Bima melihat, kebutuhan mendesak saat ini adalah untuk membenahi sistem dari hulu ke hilir. Mulai dari sistem pemilihan kepala daerah, sistem pencegahan korupsi, renumerasi hingga penegakan hukum. ■ TIF